



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG II
TAHUN SIDANG 2010-2011**

JUM'AT, 17 DESEMBER 2010

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,***

**Yang kami hormati Para Wakil Ketua,
Yang kami hormati Para Anggota Dewan,**

Hari ini Dewan akan segera menutup Masa Sidang II Tahun 2010 - 2011 yang telah dimulai sejak 22 November 2010 yang lalu. Besok pagi Dewan akan segera memasuki Masa Reses sampai dengan tanggal 9 Januari 2011 yang akan datang.

Sesuai Peraturan DPR-RI tentang Tata Tertib Pasal 218 ayat (2), kami akan menyampaikan Pidato Penutupan Masa Persidangan II yang akan menguraikan hasil kegiatan Dewan selama Masa Sidang ini dalam melaksanakan tiga fungsi Dewan, serta tanggapan terhadap berbagai permasalahan yang berkembang akhir-akhir ini, yang menjadi perhatian kita bersama.

Di penghujung tahun 2010, melalui Rapat Paripurna Dewan telah ditetapkan pimpinan dan beberapa anggota instansi penegak hukum, yaitu penetapan saudara Busro Muqodas sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui proses pemilihan di Komisi III, dan penetapan 7 (tujuh) anggota Komisi Yudisial. Pemilihan anggota Komisi Yudisial, dilakukan atas dasar pertimbangan kecakapan, integritas, dan kompetensi calon. Ketujuh anggota Komisi Yudisial yang telah mendapatkan persetujuan Dewan untuk ditetapkan adalah: Prof. Dr. H. Eman Suparman, SH.; H. Abbas Said, SH; Imam Anshori Saleh SH, M.Hum; Dr. Taufiqurrohman S., SH., MH.; Dr. Suparman Marzuki, SH., M.Si.; Dr. Jaja Ahmad Jayus, SH., M.Hum.; dan Dr. Ibrahim, SH., MH., LLM.

Komisi Yudisial adalah komisi yang mempunyai fungsi strategis dalam pemberantasan mafia peradilan. Salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim di samping berkewenangan menyampaikan usulan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR. Oleh karena itu, dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim agar independen dan bebas dari intervensi pihak manapun, maka fungsi dan kewenangan Komisi Yudisial harus benar-benar ditegaskan.

Pada kesempatan lain, Dewan juga menyambut baik atas pengangkatan Saudara Basrief Arief sebagai Jaksa Agung RI yang baru, menggantikan Saudara Hendarman Supandji, yang telah mengakhiri masa tugasnya.

Dewan dan masyarakat berharap bahwa para penegak hukum mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan senantiasa memegang teguh profesionalitas, mampu menangani kasus-kasus besar yang disorot tajam oleh masyarakat akhir-akhir ini. Melalui pengangkatan dan penetapan Ketua KPK dan Jaksa Agung yang baru, dan beberapa waktu sebelumnya pengangkatan KAPOLRI, kinerja penegak hukum diharapkan makin solid, sehingga mampu menjadi garda depan penegakan hukum di Indonesia. Dewan berkeyakinan, bahwa ketiga institusi penegak hukum tersebut adalah pilar-pilar utama pemberantasan korupsi di Indonesia.

Adapun tugas Dewan lainnya dalam rangka penetapan pejabat publik, yaitu pemilihan keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia, masih akan diselesaikan dalam Masa Persidangan III yang akan datang.

Sidang Dewan yang terhormat,

Tekad Dewan untuk melakukan optimalisasi dalam melaksanakan fungsi perundang-undangan, masih memerlukan penanganan serius oleh berbagai Alat Kelengkapan Dewan, Komisi, Pansus, dan BALEG. Dalam penyusunan Prolegnas RUU prioritas tahun 2010, 70 RUU telah ditetapkan, tetapi capaiannya masih jauh dari yang diharapkan. Realisasi Program Legislasi tahun 2010 masih belum berbanding lurus dengan jumlah RUU yang diprogramkan. Perlu diketahui bahwa penyusunan Prolegnas 2010, merupakan penyusunan Prolegnas pertama oleh DPR periode keanggotaan 2010-2014. Oleh karena itu, pada awal-awal tahun 2010 DPR lebih banyak disibukkan untuk menyusun *draft* RUU berikut naskah akademiknya. Proses pembahasan RUU, baru dilakukan pada pertengahan tahun, sehingga jumlah RUU yang selesai pada akhir tahun pertama dari periode ini tidaklah banyak.

Berbagai kendala dihadapi oleh DPR dalam pelaksanaan fungsi ini, antara lain berkaitan dengan ketaatan terhadap pemenuhan jadwal legislasi. Di samping itu, masih banyaknya RUU yang tertunda penyelesaiannya karena ketidaksepakatan atas beberapa materi pokok antara DPR dengan Pemerintah, antar fraksi-fraksi DPR, atau di internal kementerian yang ditugasi untuk menangani pembahasan RUU di DPR.

Dari 70 RUU Prioritas, 36 merupakan inisiatif DPR dan 34 inisiatif dari Pemerintah. Dari jumlah tersebut, baru dapat diselesaikan 8 RUU menjadi UU, 2 di antaranya diselesaikan pada Masa Sidang II ini, yaitu RUU tentang Perubahan Atas UU No. 2 tahun 2002 tentang Partai Politik dan RUU tentang Perubahan Atas UU No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

Delapan RUU Kumulatif Terbuka di luar RUU Prioritas, telah dapat diselesaikan. RUU Kumulatif Terbuka terdiri dari RUU yang berkaitan dengan APBN, RUU Ratifikasi Perjanjian Internasional, dan RUU tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU.

Enam Belas RUU sudah dalam proses Pembicaraan Tingkat I dan 5 RUU dalam proses harmonisasi. Dengan demikian, 21 RUU Prioritas tahun 2010 ini, siap memasuki Pembicaraan tingkat II pada Masa Sidang III dan IV, atau pada kuartal pertama tahun 2011 yang akan datang. Di antaranya adalah RUU tentang Perubahan Atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, RUU tentang Perubahan Atas UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, RUU tentang Perubahan Atas UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shodaqoh, RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan, RUU tentang Transfer Dana, dan lain-lain.

Sedangkan, 41 RUU Prioritas 2010 sudah dalam tahap penyusunan, dengan rincian 16 RUU dari DPR dan 25 RUU dari Pemerintah.

Selanjutnya, Badan Legislasi DPR telah mengusulkan Prolegnas untuk tahun 2011 dan telah mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR, sejumlah 70 RUU menjadi prioritas. Dari 70 RUU tersebut, 38 RUU diantaranya merupakan **luncuran** tahun 2010 dan 32 RUU merupakan **RUU baru**, baik yang datang dari DPR maupun dari Pemerintah. Di samping 70 RUU tersebut, terdapat 5 RUU yang bersifat kumulatif terbuka.

Banyaknya RUU yang menjadi prioritas yang harus diselesaikan pada tahun yang akan datang, Pimpinan Dewan perlu melakukan berbagai terobosan dan langkah-langkah agar kinerja legislasi dapat ditingkatkan, melalui pertemuan konsultasi Pimpinan Dewan, Pimpinan Fraksi-Fraksi, dan Pimpinan BALEG dalam waktu dekat.

Sidang Dewan yang terhormat,

Masih berkaitan dengan fungsi perundang-undangan, saat ini Dewan telah menerima tiga RUU dari Pemerintah yaitu RUU tentang

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan; RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; RUU tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Khusus mengenai RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, substansi atas RUU ini telah mengundang polemik di masyarakat khususnya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, jauh sebelum RUU ini disampaikan Presiden kepada DPR. Pimpinan Dewan mengharapkan agar materi yang akan menjadi isu krusial dari RUU ini, yaitu tentang **penetapan atau pemilihan** terhadap Gubernur DIY, sebaiknya diserahkan kepada DPR dan Pemerintah, yang akan melakukan pembahasan sesuai mekanisme dan agenda rapat yang ditetapkan oleh Rapat Badan Musyawarah DPR-RI.

Kita tidak ingin terjadi debat yang berkepanjangan di ranah publik. Sebagai wakil rakyat, Dewan pasti akan membahasnya dengan penuh kehati-hatian, mendengarkan masukan dari masyarakat, mempertimbangkan semua aspek dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan dengan menghargai keistimewaan yang dimiliki oleh Yogyakarta, sejarah perjuangan, dan budayanya.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam rangka tugas pengawasan, beberapa tim yang telah dibentuk telah melakukan tugas-tugasnya sepanjang Masa Sidang II ini. Di antaranya adalah Tim Pengawas DPR-RI terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi DPR-RI tentang pengusutan kasus Bank Century. Tujuan dibentuknya Tim Pengawas adalah untuk melakukan pengawasan terkait dengan tindak lanjut hasil rekomendasi Panitia Angket DPR RI tentang pengusutan kasus Bank Century yang telah diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 3 Maret 2010. Pengawasan dilakukan agar dapat memberikan dorongan terhadap penyelesaian secara tuntas, masalah hukum pada kasus Bank Century, terbentuknya berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sektor moneter dan fiskal secara baik, kembalinya berbagai aset (*asset recovery*) yang dimiliki Bank Mutiara (nama baru

Bank Century) yang kini 100% sahamnya dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pengawasan juga dilakukan dalam rangka penyelesaian secara tuntas kasus yang menimpa nasabah PT. Antaboga Delta Sekuritas.

Tim Pengawas DPR-RI terhadap tindak lanjut rekomendasi tentang pengusutan kasus Bank Century telah bekerja sejak 27 April 2010 dan telah melakukan serangkaian kegiatan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Pada Rapat Paripurna tanggal 16 Desember, Tim telah memberikan rekomendasi atas hasil kerjanya, yang intinya adalah [1] untuk pengawasan penegakan hukum, perlu terus dilakukan monitoring dengan melakukan rapat kerja dengan instansi penegak hukum, [2] mendesak pemerintah untuk mengajukan RUU yang terkait dengan kasus Bank Century sesuai program legislasi nasional, [3] meminta Tim Bersama (Tim Terpadu) untuk membuat kerangka kerja yang jelas mengenai pelaksanaan *recovery asset*, [4] tindak lanjut penyelesaian kasus PT. Antaboga Delta Sekuritas masih diperlukan, terutama untuk merumuskan dan menyepakati skema penyelesaian nasabah bank, [5] perlu melakukan monitoring yang intensif terhadap pelaksanaan audit forensic sejak penyusunan TOR sampai dengan penetapan konsultan dan laporan hasil kerjanya. Atas dasar rekomendasi ini, Tim meminta paripurna DPR memperpanjang masa kerja Tim Pengawas.

Adapun tim-tim lain yang telah bekerja secara efektif adalah Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang hasilnya telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna Dewan.

Tim Pemantau berpendapat bahwa 9 Peraturan Pemerintah (PP) dan 3 Peraturan Presiden (Perpres) sebagai pelaksanaan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang harus dilaksanakan paling lambat 2 tahun, saat ini baru diselesaikan 3 PP dan 2 Perpres. Dengan demikian, masih terdapat 6 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang belum diterbitkan karena masih dalam proses pembahasan, diharapkan diselesaikan segera.

Adapun Pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Tim Pemantau mendapatkan bahwa 7 pasal yang diamanatkan dalam UU ini perlu ditindaklanjuti dengan berbagai PP. Sampai saat ini, Pemerintah baru menerbitkan 3 PP.

Tim Pemantau mendorong pemerintah untuk menyelesaikan peraturan pelaksanaannya agar otonomi khusus dapat berjalan dengan baik. Untuk peraturan pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001 di tingkat daerah, saat ini pemerintah provinsi telah menerbitkan 8 Perdasus (Peraturan Daerah Khusus) dan 15 Perdas (Peraturan Daerah Provinsi). Namun, masih ada Perdas dan Perdasus yang belum terbentuk, sehingga dikhawatirkan dapat menghambat pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pembangunan di Papua antara lain, kendala geografis, kultur dan strata sosial masyarakat dan keterbatasan SDM berpengaruh pada laju pembangunan, manajemen pemerintahan yang belum maksimal bersinergi, keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas terhadap sumber daya daerah.

Tim lain yang dibentuk adalah Tim Pengawas Bencana Alam untuk Provinsi Jambi, Sumatera Barat, dan Jawa Barat. Tim ini telah bekerja dan telah melaporkan hasilnya dalam Rapat Paripurna. Rekomendasi dari laporan tim tersebut antara lain, Pemerintah Daerah perlu melakukan pembenahan dan evaluasi terhadap penanganan bencana pada saat tanggap darurat dan pasca-tanggap darurat, dan harus dapat dipastikan bahwa para korban bencana telah mendapatkan bantuan. Tim juga menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Tim berkesimpulan, perlunya transparansi dari Pemerintah Daerah mengenai dana bantuan yang telah diterima dari Pemerintah Pusat melalui APBN dan bantuan dari berbagai pihak.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam melaksanakan fungsi anggaran, pada Masa Persidangan ini, Komisi-Komisi DPR, dan utamanya Badan Anggaran, telah memonitor dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN 2010, mengingat Masa Sidang II merupakan semester akhir dari tahun anggaran yang berjalan. Pada kesempatan ini Dewan mengingatkan Pemerintah agar konsisten dan benar-benar melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi yang diambil sesuai rencana kerja setiap tahun yang sudah ditetapkan. Kepastian, komitmen, dan konsistensi Pemerintah memperbaiki perekonomian nasional merupakan keharusan, agar terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kredibel (*good governance*). Dewan berharap agar kepercayaan masyarakat harus benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menumbuhkan kebersamaan dan kemandirian dalam pembangunan di berbagai bidang.

Berkaitan dengan pelaksanaan APBN, Dewan juga memantau bahwa menjelang akhir tahun 2010, perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS cenderung mengalami penguatan yang cukup berarti. Kurs rupiah telah didasarkan pada mekanisme pasar. Kita perlu mengingatkan agar otoritas moneter mampu menjaga momentum stabilitas kurs rupiah. Penguatan (*apresiasi*) rupiah terhadap dolar, di satu sisi akan memperlemah ekspor, namun di sisi lain dapat menambah kredibilitas rupiah, karena harga barang impor akan menjadi murah di pasar. Dalam kaitan ini, Dewan juga mengingatkan Pemerintah untuk menyikapi dan mengantisipasi terjadinya "perang kurs" sebagaimana yang terjadi pada mata uang Yuan (China).

Krisis ekonomi yang terjadi di Eropa, khususnya di Irlandia, dan situasi yang memanas di Semenanjung Korea baru-baru ini, dikhawatirkan akan berpengaruh pada perkembangan ekonomi global. Indonesia perlu mencermati mengenai hal ini, karena situasi ini juga akan berdampak pada perkembangan arus modal asing yang masuk ke Indonesia melalui pasar modal. Dewan berpendapat, arus modal asing jangka pendek cenderung tidak memberikan kontribusi bagi perekonomian domestik, karena setiap saat dapat mengalir kembali keluar. Kita berharap, situasi global yang berpengaruh kepada aliran

modal asing (*capital inflow*) perlu dialihkan untuk jangka panjang (*foreign direct investment*), yang memang memberikan banyak manfaat bagi perekonomian dan pembangunan, termasuk penciptaan lapangan kerja baru. Untuk mengatasi hal itu, Bank Indonesia diminta bersiap dengan sejumlah instrumen dan kebijakan. Agar dana masuk ke investasi jangka panjang, Pemerintah perlu mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN), melakukan penawaran saham (*Initial Public Offering/IPO*) serta mempercepat pembangunan infrastruktur.

Sidang Dewan yang terhormat,

Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Menko Ekuin, Menteri ESDM, dan Menteri Keuangan, telah membahas mengenai rencana kebijakan pengaturan BBM bersubsidi. Komisi VII meminta Pemerintah menindaklanjuti amanat Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011 melalui kebijakan pengaturan BBM bersubsidi yang dimulai tahun 2011. Namun dalam kaitan dengan rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi yang seyogyanya akan diberlakukan pada 1 Januari 2011 secara terbatas di wilayah Jabodetabek, sesuai hasil Rapat Kerja Komisi VII, Dewan menolak kebijakan tersebut. Dewan mendesak pemerintah untuk mengkaji dampak sosial-ekonomi masyarakat, dan lonjakan inflasi yang ditimbulkannya. Dewan juga mempertanyakan kesiapan PT. Pertamina (persero) dalam memenuhi lonjakan kebutuhan BBM Pertamina dan Pertamina-plus di seluruh wilayah Indonesia.

DPR juga meminta Pemerintah agar melaksanakan kegiatan sosialisasi secara menyeluruh dan pengawasan yang ketat untuk mengurangi dampak negatif dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Komisi VII juga meminta Pemerintah untuk melengkapi kajian sesuai dengan amanat penjelasan Pasal 7 UU ayat (2) huruf (c). Setelah kajian disetujui DPR-RI, Pemerintah segera mengimplementasikan kebijakan pengaturan BBM bersubsidi tersebut pada akhir kwartal pertama tahun 2011 secara bertahap. Kita memahami bahwa kebijakan ini dimaksudkan untuk menyehatkan keuangan negara. Penghematan subsidi BBM tentu sangat berarti apabila dananya dapat

dimanfaatkan bagi pembangunan sarana dan prasarana transportasi massal yang nyaman, yang sekarang ini masih didambakan masyarakat. Dengan demikian, pembatasan pemakaian BBM bersubsidi dirasakan adil apabila dilakukan kompensasi dalam pemanfaatannya.

Berkaitan dengan pengembangan sektor transportasi udara, rencana PT. Garuda Indonesia (Persero) untuk melakukan *Initial Public Offering* (IPO) pada bulan Februari 2011, juga menjadi perhatian Dewan. Dalam kaitan ini, DPR menyarankan pihak manajemen PT. Garuda Indonesia (Persero) untuk lebih dahulu memperbaiki kinerja usahanya sebelum melakukan IPO, sehingga harga saham yang ditawarkan ke publik memberikan gambaran yang positif, wajar, dan transparan. Dengan demikian, tidak memunculkan polemik seperti yang terjadi pada IPO PT. Krakatau Steel.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam bidang kesejahteraan rakyat, Dewan dan Pemerintah telah melakukan beberapa kali bahasan mengenai pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2011. Komisi X telah membentuk Panitia Kerja Ujian Nasional. Dewan sependapat dengan Pemerintah, bahwa Ujian Nasional bukanlah satu-satunya standar kelulusan. Dalam kaitan ini, Panitia Kerja bersama Pemerintah telah berhasil merumuskan sebuah formula baru yang menjadi standar penilaian kelulusan siswa SMP dan SMA dan yang sederajat. Formula yang akan diterapkan pada pelaksanaan Ujian Nasional 2011 akan mengakomodasi hasil belajar siswa selama di sekolah yang terdiri dari nilai rapor, ujian sekolah, dan ujian nasional. Dengan demikian, formula ini diharapkan dapat meningkatkan rasa adil bagi peserta didik dan juga dapat lebih meningkatkan mutu kelulusan pendidikan.

Masalah sosial lain yang sangat memprihatinkan kita dan menyita perhatian Dewan dan masyarakat adalah kebijakan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Dewan merasa prihatin terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM yang menimpa para TKI, terutama kasus kekerasan, perlakuan yang tidak

manusiawi, pembunuhan, dan terlantarnya puluhan TKI yang hidup terlunta-lunta di kolong jembatan di negara tempat mereka mencari nafkah. Arab Saudi selama ini memang merupakan salah satu negara tujuan utama dari sebagian besar TKI kita yang bekerja di luar negeri sejak tahun 1977. Hal tersebut disebabkan besarnya peluang kerja bagi TKI, sehingga jumlahnya makin bertambah dari tahun ke tahun. Merujuk pada data KBRI Riyadh, pada bulan Juni 2010, pada saat ini tercatat 231.873 WNI di Arab Saudi, di antaranya jumlah TKI informal sebanyak 141.009 orang.

Menghadapi hal ini, Komisi-komisi DPR-RI bersama Pemerintah telah melakukan Rapat kerja khusus membahas mengenai masalah perlindungan WNI di luar negeri, khususnya para TKI. Dewan meminta pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap ribuan TKI di luar negeri dan bertindak proaktif dalam melindungi kepentingan mereka. Dewan meminta Pemerintah melakukan pembenahan di dalam negeri dan meningkatkan diplomasi demi melindungi nasib TKI dengan Pemerintah di negara tujuan, terutama dengan negara-negara yang kekerasan terhadap TKI sangat tinggi.

DPR mendorong Pemerintah untuk melakukan lobi-lobi personal oleh para ulama maupun tokoh masyarakat, dan jika diperlukan juga melibatkan lembaga HAM internasional untuk ikut menekan pemerintah negara tujuan, serta mengawal seluruh proses hukum.

Pada kesempatan Sidang Asian Parliamentary Assembly (APA) di Syria baru-baru ini, delegasi Indonesia telah mengusulkan satu resolusi tentang perlindungan terhadap pekerja migran. Delegasi DPR-RI dipimpin Ketua DPR, mengusulkan dan telah disetujui, untuk dibentuk tim khusus/*sub-committee* yang membahas mengenai perlindungan pekerja migran. Pada pertemuan bilateral antara Ketua DPR RI dengan Ketua Parlemen Syria yang sekarang menjabat Presiden Asian Parliamentary Assembly (APA), telah diperoleh komitmen untuk menjamin perlindungan terhadap TKI di negara Syria dengan cara merespon secara cepat apabila ada TKI yang mengalami masalah.

Atas kasus-kasus TKI ini, Dewan memandang perlu melakukan revisi terhadap UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, agar persoalan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dapat ditangani secara lebih baik, demokratis, dan berkeadilan, dengan berpedoman kepada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam kasus kekerasan TKI baru-baru ini, DPR telah membentuk Tim Khusus Penanganan TKI di Arab Saudi.

Sidang Dewan yang terhormat,

Kita baru saja memperingati Hari AIDS se-Dunia yang jatuh pada setiap tanggal 1 Desember. Meskipun secara internasional angka kematian akibat HIV/AIDS telah berhasil ditekan dalam sepuluh tahun terakhir, namun di Indonesia angka pengidap HIV/AIDS masih terus bertambah. Dari seluruh penderita HIV/AIDS di Indonesia, 70 persennya adalah mereka yang berusia produktif. Adapun bila dilihat dari jumlah perempuan yang menderita HIV/AIDS, maka sebagian besar pengidap penyakit ini adalah ibu rumah tangga yang tertular dari suaminya yang memiliki perilaku seks yang tidak sehat, bukan kaum pekerja seks komersial seperti anggapan umum selama ini.

Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran HIV/AIDS telah meluas, karena pada akhirnya ibu penderita HIV/AIDS berpotensi menularkan virus tersebut kepada anak-anak yang dilahirkannya. Untuk itu, Dewan meminta agar pemerintah melakukan segala upaya untuk mengatasi penyakit ini, baik yang bersifat preventif maupun rehabilitatif.

Terkait dengan bencana alam yang sampai saat ini masih terjadi di beberapa wilayah di tanah air, Dewan mengharapkan agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat melakukan segala tindakan untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut. Hujan lebat yang terjadi beberapa hari ini telah menyebabkan banjir di 13 kabupaten dan kota di Jawa Timur dan Jawa Barat, serta daerah Tebing Tinggi di Sumatera Utara.

Meskipun status Gunung Merapi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah telah turun menjadi siaga, namun dampak lanjutan dari letusan masih terus dirasakan. Ancaman banjir lahar dingin yang terus saja terjadi masih menimbulkan persoalan bagi warga Magelang dan Yogyakarta. Masih aktifnya Gunung Bromo dan Anak Gunung Krakatau juga perlu diwaspadai oleh pemerintah daerah setempat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Komisi VII telah meminta Menteri Riset dan Teknologi, serta Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) untuk lebih meningkatkan kemampuan teknologi dan sosialisasi *Tsunami Early Warning Systems* (TEWS), memberikan pelatihan-pelatihan terhadap masyarakat di daerah pesisir pantai rawan bencana dengan tetap memperhatikan kearifan lokal.

Sidang Dewan yang terhormat,

Di era globalisasi saat ini, persaingan demi memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara menjadikan upaya untuk menjaga perdamaian dunia tidak makin mudah. Oleh karena itu, setiap negara harus berusaha dan bekerja sama mengedepankan kepentingan bersama demi menciptakan perdamaian dunia. Saat ini kita merasa prihatin dengan terjadinya konflik di Semenanjung Korea yang dapat mengancam stabilitas kawasan.

Dewan berharap setiap pihak yang bertikai dapat menahan diri agar konflik ini tidak berkembang jauh. Indonesia yang memiliki hubungan diplomatik dengan kedua negara, dapat membantu menjadi mediator dalam mencari solusi damai, demi stabilitas keamanan kawasan. Mengingat jumlah WNI yang bekerja di Korea Selatan cukup banyak, Dewan meminta Pemerintah juga siap dengan rencana penyelamatan dan pemulangan WNI bila situasi keamanan di Semenanjung Korea makin memburuk.

Dalam kerangka diplomasi parlementer, dan dalam rangka membangun kerjasama multilateral, saat ini Indonesia menjadi ***Ketua Asia-Pacific Geopolitical Group di Inter-Parliamentary Union***

(IPU) sampai Oktober 2011. Kepemimpinan Indonesia untuk 2011 menjadi strategis, mengingat pada saat ini IPU sedang membahas **future plan IPU** untuk kurun waktu 2010-2015. Untuk itu, Indonesia bukan saja harus mampu menggerakkan 27 parlemen anggota di kelompok ini, untuk memberikan masukan kepada IPU, juga Indonesia berkesempatan memberikan gagasan dan kontribusi penting bagi perkembangan organisasi ini ke depan.

Kepemimpinan Ketua DPR-RI selama 2 tahun menjadi **Presiden Asian Parliamentary Assembly (APA)** yang berakhir awal bulan ini, memberikan arti penting bagi perkembangan diplomasi parlemen Indonesia yang makin meningkat. Di bawah kepemimpinan Indonesia, APA telah berhasil memperjuangkan berbagai resolusi, baik di bidang ekonomi, politik maupun sosial-budaya antara lain resolusi tentang dukungan terhadap hak asasi bangsa Palestina, strategi penangkalan terorisme, perwujudan pemerataan kesehatan, isu lingkungan dan usulan perlindungan pekerja migran.

Sementara itu, Indonesia juga akan menjabat **Presiden Konferensi Parliamentary Union of OIC Member State (PUIC)** sampai tahun 2014. Hal ini merupakan sejarah baru, karena Indonesia (DPR-RI), merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang menjabat posisi sebagai Presiden Konferensi PUIC. Terpilihnya Ketua DPR-RI sebagai President of the 7th PUIC Conference membawa konsekuensi tersendiri terutama tanggung jawab untuk melaksanakan sebaik-baiknya sidang PUIC yang direncanakan diadakan di Palembang pada tanggal 23-31 Januari 2012.

PUIC adalah organisasi parlemen dari negara anggota OKI yang beranggotakan 51 negara dan 15 observer dari organisasi parlemen regional dan internasional. Untuk itulah, kami mohon dukungan seluruh anggota Dewan agar tugas kepemimpinan DPR-RI di organisasi internasional ini dapat bermanfaat bagi bangsa Indonesia selain memberikan kontribusi terhadap percaturan politik internasional.

Masih dalam kerangka diplomasi parlemen, BKSAP telah membentuk Panitia Kerja *Millennium Development Goals* (Panja MDGs) untuk memperkuat peran parlemen dalam upaya pencapaian MDGs

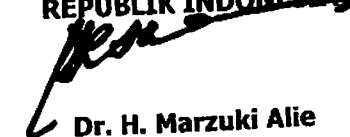
2015 di Indonesia. Berbagai kegiatan telah dilakukan, baik di luar maupun dalam negeri, antara lain dengar pendapat dengan pemangku kepentingan di tanah air dengan menghimpun informasi aktual. Sebagai suatu komitmen internasional, Indonesia perlu melihat keberhasilan dari parlemen dan pemerintah negara lain untuk dicontoh dan disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Panitia kerja berharap, dengan berperan aktif di kancah internasional, Indonesia dapat menggalang kemitraan internasional, khususnya bantuan dari negara maju, untuk percepatan upaya pencapaian di Indonesia.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam Sidang Paripurna Dewan hari ini. Sebelum menutup sidang ini, izinkan Pimpinan mengucapkan **Selamat Tahun Baru 1432 Hijriyah** dan **Selamat Natal** bagi Anggota Dewan yang merayakannya dan **Selamat Tahun Baru 2011** bagi seluruh Bangsa Indonesia. Semoga di tahun mendatang kita dapat melaksanakan tugas konstitusional kita dengan lebih baik. Akhirnya, izinkanlah kami menutup sidang ini dengan mengucapkan *Alhamdulillahirrabbi'alamin*.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Jakarta, 17 Desember 2010

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA


Dr. H. Marzuki Alie